



Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

## Pj Sekda Serahkan LKPD 2023 ke BPK RI Kalteng



LAPORAN Pj Sekda Barito Utara, Drs. Jufriansyah (kanan) menyerahkan LKPD unaudit tahun anggaran 2023 kepada BPK RI Kalteng, M Ali Asyhar di Kantor BPK RI Perwakilan Kalteng, Jumat (3/5).

**MUARA TEWEH-Pj** Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Utara, Drs. Jufriansyah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudit tahun anggaran 2023, kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng), Jumat (3/5).

Hal ini sebagai wujud transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pj Sekda Barito Utara Drs. Jufriansyah dalam menyerahkan LKPD Barito Utara didampingi Inspektur Barito

Utara, Kadis PUPR, Kadis Kesehatan, Direktur HSLID Muara Teweih, Plt Kaban BPKA, Perwakilan Dinas Pendidikan Barito Utara.

Jufriansyah mengatakan, penyerahan LKPD tahun anggaran 2023 agar selanjutnya dapat segera dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Kami berharap, kita dapat mempertahankan opini yang ke 10 kalinya, sebagai motivasi untuk selalu melakukan peningkatan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara," ulas Jufriansyah.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, M Ali Asyhar berharap, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan baik, seperti kemudahan komunikasi dari para kepala daerah serta seluruh jajarannya untuk memberikan data dan keterangan yang diperlukan dalam proses pemeriksaan.

"Supaya pemeriksa BPK dapat melaksanakan tugas pemeriksaannya dengan baik dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dasar BPK yaitu integritas, independensi dan profesionalisme," jelas M Ali.

Dengan dilaksanakannya penyerahan LKPD ini, maka BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, akan segera melaksanakan pemeriksaan terinci atas LKPD unaudit tahun anggaran 2023.

"Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2023, dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD," pungkas Ali Asyhar. (her)